

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya, namun, Indonesia masih memiliki banyak permasalahan dalam menyejahterahkan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat merupakan terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan Pendidikan. Menurut Pigou (1960) teori ekonomi kesejahteraan merupakan bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Pengertian sejahtera itu sendiri merupakan kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia (HDI = *Human Development index*), yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. Indikator kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri menurut publikasi BPS (Badan pusat statistika), menyarankan tujuh komponen untuk mengukur tingkat kesejahteraan yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf pola konsumsi, perumahan dan lingkungan sosial budaya. Menurut pandangan para ahli ekonomi bahwa kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat.

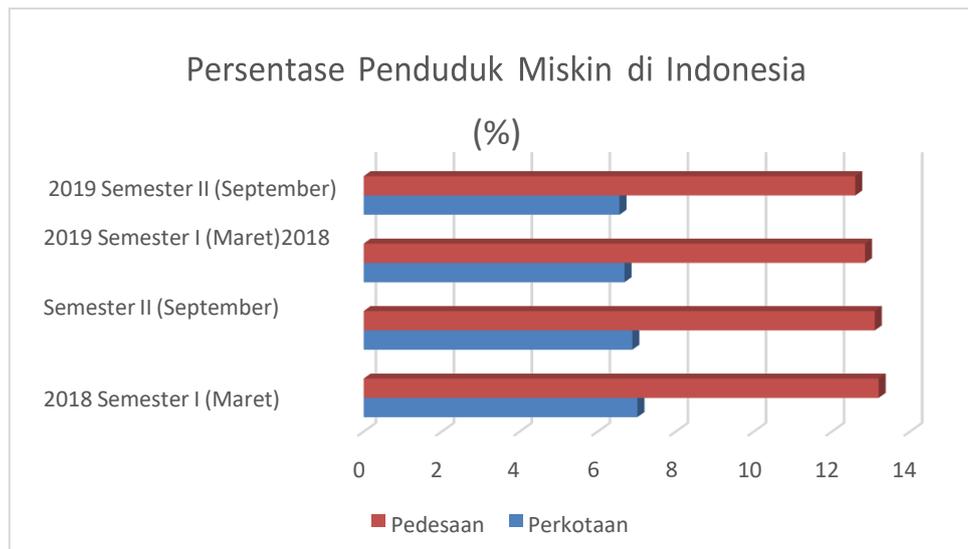
Berdasarkan uraian di atas, konsep kesejahteraan memiliki makna yang tidak luas karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan (Dwi, 2008). Kebalikan atau lawan dari kesejahteraan adalah kemiskinan. Kemiskinan menurut BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) ialah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya. World Bank menjelaskan kemiskinan dalam standar ukur kemiskinan secara global, yakni kemiskinan merupakan perihal kekurangan pendapatan minimum US\$ 1 per hari. UNDP (*United Nations Development Programme*) menerapkan definisi kemiskinan yang mencakup aspek-aspek seperti kebutuhan dasar, gaya hidup yang ditentukan sendiri, pilihan, aset, kapabilitas, inklusi sosial, ketidak setaraan, hak asasi manusia, pemukiman, kerentanan, pemberdayaan dan kesejahteraan subjektif.

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, termasuk di Negara Sedang Berkembang seperti Indonesia yang sejak tahun 2004 telah memiliki penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal standar hidup tertentu (Mudrajad, 1997: 103).

Kemiskinan merupakan hambatan yang mengakibatkan orang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya dan mengakibatkan perekonomian terpuruk. Menurut Itang (2015) faktor yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan adalah pendapatan masyarakat yang rendah, tingginya pengangguran, malas bekerja, rendahnya pendidikan dimana pendidikan yang rendah akan mengakibatkan seseorang kurangnya keterampilan dan keterbatasan untuk masuk dalam dunia kerja, terbatasnya lapangan usaha juga merupakan masalah bagi masyarakat yang sedang mencari kerja lapang usaha yang sedikit akan mengakibatkan pengangguran semakin bertambah sehingga mengakibatkan kemiskinan semakin meningkat, secara ideal seseorang

harus mampu menciptakan lapangan usaha baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan juga keterampilan. Kurangnya sumber daya alam juga merupakan masalah bagi masyarakat dimana apabila masyarakat yang memiliki sumber daya alam yang rendah maka pendapatan masyarakat juga rendah dan kebutuhan masyarakat juga terbatas tidak lagi memberikan keuntungan bagi masyarakat yang rendah akan sumber daya alamnya, sehingga dapat dikatakan masyarakat itu miskin karena sumber daya alam nya terbatas (Rusdiansyah, 2019). Di mana kemiskinan yang semakin meningkat maka dibutuhkan upaya pembangunan berkelanjutan untuk menangani permasalahan terkait kemiskinan dikarenakan banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan. Dampak dari adanya kemiskinan dapat mengakibatkan tingkat kriminalitas tinggi, akses pendidikan tertutup, tingkat pengangguran tinggi, angka kematian meningkat dan munculnya konflik di

masyarakat. Pembangunan daerah sangatlah penting untuk mendorong masyarakat atau memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membangun daerahnya dan menyejahterhkan masyarakatnya. Menurut Arsyad (1999) pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan terhadap pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Berdasarkan data BPS, pada bulan september 2019 angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,22%. Angka tersebut lebih rendah dari 0,19% dibanding periode maret 2019. Gambar 1.1 berikut ini menunjukkan perkembangan persentase penduduk miskin di Indonesia selama tahun 2018 – 2019:



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia

Data pada gambar tersebut menunjukkan persentase penduduk miskin di Indonesia berdasarkan kategori di pedesaan dan di perkotaan. Persentase penduduk miskin di pedesaan lebih besar dari pada persentase penduduk miskin di perkotaan. Pada tahun 2018 semester I (Maret) menunjukkan persentase penduduk miskin di pedesaan terbesar selama tahun 2018-2019 sebesar 13,2% dan terus menurun hingga semester II (September) tahun 2019. Sama halnya dengan persentase penduduk miskin di perkotaan yang juga mengalami penurunan dari semester I (Maret) 2018 hingga semester II (September) tahun 2019 dimana persentase penduduk miskin terbesar di perkotaan terjadi pada semester I (Maret) tahun 2018 sebesar 7,02%. Berdasarkan hasil penelitian Hasibuan et al. (2019), faktor yang menyebabkan tingkat kemiskinan di pedesaan meliputi: jumlah penduduk, tingkat pendidikan, alokasi dana desa dan jumlah toko usaha. Gambar 1.2 menunjukkan persebaran jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan kepulauannya pada tahun 2019 :



Sumber: *Badan Pusat Statistika (BPS)*

Gambar 1.2 Persebaran Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

Persebaran penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019 lebih dari setengahnya terkonsentrasi di pulau Jawa dengan proporsi sebesar 51%, besarnya jumlah penduduk miskin di pulau Jawa dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang tinggal di pulau Jawa dan mayoritas persentase tingkat kemiskinan provinsi di pulau Jawa tergolong tinggi. Pulau Jawa memiliki enam provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta dan Banten.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi di pulau Jawa yang termasuk mengalami permasalahan terkait kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat selama tahun 2017-2019 ditunjukkan dalam tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat

Wilayah Jawa Barat	2017	2018	2019	Jumlah
Provinsi Jawa Barat	4.168,40	3.615,80	3.399,20	11.183,40
Bogor	487,3	415	395	1.297,3
Sukabumi	197,1	166,3	153,3	516,7

Cianjur	257,4	221,6	207,1	686,1
Bandung	268	246,1	223,2	737,3
Garut	291,2	241,3	235,2	767,7
Tasikmalaya	189,4	172,4	159,9	521,7
Ciamis	96,8	85,7	79,4	261,9
Kuningan	141,6	131,2	123,2	396
Cirebon	279,6	232,4	217,6	729,6
Majalengka	150,3	129,3	121,1	400,7
Sumedang	120,6	112,1	104,2	336,9
Indramayu	233,4	204,2	191,9	629,5
Subang	167,8	136,6	129,2	433,6
Purwakarta	85,3	75,9	71,9	233,1
Karawang	236,8	188	173,7	598,5
Bekasi	164	157,2	149,4	470,6
Bandung Barat	190,9	169	159	518,9
Pangandaran	39,5	32,2	30,7	102,4
Kota Bogor	76,5	64,9	64	205,4
Kota Sukabumi	27,4	23,2	21,9	72,5
Kota Bandung	104	89,4	84,7	278,1
Kota Cirebon	30,2	28	26,8	85
Kota Bekasi	136	119,8	113,7	369,5
Kota Depok	52,3	49,4	49,4	151,1
Kota Cimahi	34,5	29,9	26,9	91,3
Kota Tasikmalaya	97,9	84,2	77	259,1
Kota Banjar	12,9	10,4	10,1	33,4

Sumber : BPS Jawa Barat

Pada tabel 1.1 dapat diketahui lima besar wilayah di Jawa Barat dengan jumlah penduduk miskin paling banyak selama tahun 2017-2019, meliputi:

1. Bogor dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1.297,3 ribu jiwa.

2. Garut dengan jumlah penduduk miskin sebesar 767,7 ribu jiwa
3. Bandung dengan jumlah penduduk miskin sebesar 737,3 ribu jiwa
4. Cirebon dengan jumlah penduduk miskin sebesar 729,6 ribu jiwa
5. Indramayu dengan jumlah penduduk miskin sebesar 629,5 ribu jiwa

Sedangkan untuk lima besar wilayah di Jawa Barat dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit selama tahun 2017-2019, meliputi:

1. Kota Banjar dengan jumlah penduduk miskin sebesar 33,4 ribu jiwa
2. Kota Sukabumi dengan jumlah penduduk miskin sebesar 72,5 ribu jiwa
3. Kota Cirebon dengan jumlah penduduk miskin sebesar 85 ribu jiwa
4. Kota Cimahi dengan jumlah penduduk miskin sebesar 91,3 ribu jiwa
5. Pengandaran dengan jumlah penduduk miskin sebesar 102,4 ribu jiwa

Dimana jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mengalami penurunan pada setiap tahunnya keberhasilan dari upaya penanggulangan kemiskinan memperlihatkan pengaruh positif yang dimana penurunan kemiskinan tersebut bisa saja disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain adalah: Pertumbuhan Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, dan tenaga kerja.

Kemiskinan merupakan persoalan yang masih sulit terpecahkan. Terdapat banyak penyebab kemiskinan, beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz (1997) yaitu: pendidikan yang terlalu rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal, dan beban keluarga.

Selain itu pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat juga berpengaruh terhadap kemiskinan karena manusia berkembang jauh lebih cepat dibanding dengan produksi hasil – hasil pertanian yang akan menyebabkan penduduk kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehingga akan berimbas pada kemiskinan. Berikut tabel pertumbuhan penduduk di Jawa Barat

Tabel 1.2 Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah penduduk (Jiwa)
1	2015	1.48 %	46,7 rb
2	2016	1.43 %	47,3 rb
3	2017	1,39 %	48,0 rb
4	2018	1,34 %	48,6 rb
5	2019	1.30 %	49,3 rb

Sumber : BPS Jawa Barat (diolah)

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat mengalami Penurunan. Pertumbuhan penduduk 9 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup pesat dimana pada tahun 2015 pertumbuhan penduduk Jawa Barat sebesar 1,48% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,30%. Sedangkan jumlah penduduk selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya Hal ini menunjukkan bahwa Jumlah penduduk tersebut akan berdampak terhadap kemiskinan jika penduduk tidak mempunyai kapasitas tinggi untuk menghasilkan dan menyerap produksinya.

Jawa Barat merupakan Provinsi berkembang dengan jumlah penduduk yang tinggi. Memiliki potensi pasar yang cukup besar dilihat dari sisi input tenaga kerja. Jumlah penduduk yang tinggi maka dapat menggerakkan pasar dari sudut permintaan melalui multiplier effect karena adanya agregat demand yang tinggi. Sebagai sumber tenaga kerja, jumlah penduduk

yang besar dapat menjadi penggerak perekonomian dari sisi penawaran. Namun, pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja maka akan mengakibatkan terjadinya masalah ketenagakerjaan seperti semakin tinggi angka pengangguran yang dapat meningkatkan probabilitas kemiskinan, kriminalitas dan fenomena sosial ekonomi di masyarakat (Wahyuni, 2005).

Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah yang cukup serius dihadapi oleh negara berkembang seperti Negara Indonesia. Menurut Alghofari, 2010 menyatakan bahwa pengangguran terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja sehingga pengangguran semakin bertambah.



Sumber: BPS Jabar (diolah)

Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Grafik 1.3 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2017-2019 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 8,23 akan tetapi tingkat pengangguran terbuka yang dimana dilihat dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 8,04 yang artinya pada tahun 2019 dimana tingkat pengangguran terbuka semakin berkurang apabila di lihat dari Provinsi Jawa Barat.

Ketika pengangguran meningkat maka kemiskinan juga akan bertambah dan sebaliknya apabila tingkat pengangguran menurun maka penduduk miskin juga berkurang. Dalam teorinya dimana pengangguran dengan kemiskinan memiliki hubungan karena masyarakat yang menganggur tidak mempunyai penghasilan dimana masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan di katakan tidak sejahtera yang dimana masyarakat itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengangguran menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dimana pengangguran yang semakin banyak akan mengakibatkan jumlah penduduk miskin semakin bertambah. Menurut Sukirno (2008), pengangguran diartikan sebagai seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan.

Menurut Sukirno (2000), semakin meningkatnya pengangguran maka akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, berkurangnya pendapatan masyarakat akan mengakibatkan efek negatif yaitu turunnya kesejahteraan masyarakat yang menimbulkan efek baru masalah lain yaitu kemiskinan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rydho Andyka dkk (2018), yang membuktikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan pada 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah hal ini membuktikan bahwa adanya masalah pengangguran berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahterah

diartikan sebagai penurunan tingkat kemiskinan dan sumberdaya alam yang memadai, banyaknya masyarakat yang terserap dalam tenaga kerja.

Menurut penelitiannya, Sulistiawati (2012) mengatakan bahwa penyerapan tenaga kerja mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang artinya banyaknya masyarakat yang sejahterah maka banyak masyarakat yang terserap dalam tenaga kerja hal ini akan menurunkan jumlah penduduk miskin.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam pembangunan nasional, secara umum tenaga kerja adalah sebagian dari penduduk di suatu negara yang mampu menghasilkan atau memenuhi permintaan barang dan jasa. Tenaga kerja dan masyarakat merupakan salah satu faktor penting, dimana ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan penduduk akan mampu meningkatkan produktivitas yang tinggi. Selain produktivitas yang tinggi jumlah penduduk juga akan mempengaruhi cakupan pangsa pasar yang luas, jumlah penduduk yang banyak akan meningkatkan sisi permintaan tenaga kerja (Djulus et al., 2018).

Permintaan tenaga kerja bersifat derived demand, yaitu permintaan yang ditentukan oleh permintaan lainnya. Permintaan tenaga kerja ditentukan oleh permintaan barang-barang atau output yang diproduksinya. Semakin banyak permintaan output hasil produksi, maka semakin banyak permintaan tenaga kerjanya (Rostiana et al.,2015).

Hal ini juga berpengaruh negatif karena semakin banyaknya permintaan tenaga kerja maka banyak masyarakat yang terserap dalam tenaga kerja sehingga pengangguran semakin berkurang yang dimana pengangguran rendah maka jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dan masyarakat menjadi sejahterah.

Menurut Undang – Undang No.13 tahun 2003 yang termasuk tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan atau melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan

jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau masyarakat. Selain itu sektor pertanian juga memiliki daya serap yang cukup tinggi terhadap tenaga kerja yang ada sehingga sektor pertanian juga sebagai penyedia tenaga kerja bagi sektor industry dan jasa. Dimana sektor pertanian sendiri merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian dan kelangsungan hidup masyarakat terutama dalam penyediaan lapangan kerja maupun pemanfaatan sumberdaya alam seperti makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sektor pertanian dengan kemiskinan sendiri sangatlah penting hubungannya karena sebagian besar banyak masyarakat di negara – negara berkembang khususnya di pedesaan yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, oleh karena itu pemerintah harus sungguh–sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Namun hal ini juga banyak masyarakat pedesaan dimana sumber utama pendapatannya berasal dari aktivitas non pertanian.

World bank (2007) menjelaskan bahwa rumah tangga di pedesaan khususnya di Indonesia lebih dari 60% yang bekerja di pertanian (pertanian, kehutanan dan perikanan) namun kurang dari 30% pangsa pendapatan rumah tangga pedesaan yang berasal dari non pertanian (industri, pertambangan, bangunan, jasa, perdagangan, asuransi dll). Semakin banyaknya penyerapan tenaga kerja maka tingkat pengangguran semakin berkurang dan membuat jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sehingga masyarakat akan sejahterah dan Makmur.

Selain itu, salah satu hal yang menentukan kemakuran suatu masyarakat dan keberhasilan pembangunan di suatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya yaitu dari sisi Indeks Pembangunan Manusianya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Menurut BPS, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia

(masyarakat/penduduk). Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah.

Namun apabila kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

Dimana IPM juga merupakan investasi dalam bidang pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan juga keterampilan tenaga kerja. Peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mendorong meningkatnya produktivitas tenaga kerja, sehingga perusahaan akan bersedia memberikan upah/gaji yang lebih besar, kepada pekerja tersebut sehingga semakin banyak manusia yang terserap dalam tenaga kerja maka akan menurunkan tingkat pengangguran sehingga menurunnya jumlah penduduk miskin (Saepudin., 2011).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Lanjouw dkk (dalam Yani Mulyaningsih, 2008) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan mudah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan sehingga meningkatnya pendapatan banyak masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya maka masyarakat di katakan sejahterah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat yang mana tingkat kemiskinan relatif rendah dibandingkan dengan daerah lain selain itu didalam penelitian ini dilihat bagaimana pengaruh variabel Pertumbuhan Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Penduduk penduduk setengah menganggur, Tenaga kerja sektor pertanian maupun sektor non pertanian . Serta seberapa besar pengaruh nya terhadap kemiskinan di Jawa Barat Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, IPM, Penduduk setengah menganggur, Tenaga kerja sektor pertanian dan Tenaga kerja sektor non pertanian terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan jumlah penduduk miskin, pertumbuhan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penduduk setengah menganggur, tenaga kerja sektor pertanian, tenaga kerja sektor non- pertanian di kab/kota Jawa Barat ?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penduduk setengah menganggur, tenaga kerja sektor pertanian, tenaga kerja sektor non-pertanian terhadap jumlah penduduk miskin di Kab/ kota Jawa Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui perkembangan jumlah penduduk miskin, pertumbuhan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penduduk setengah menganggur, tenaga kerja sektor pertanian, tenaga kerja sektor non- pertanian di kab/kota Jawa Barat.
2. Mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penduduk setengah menganggur, tenaga kerja sektor pertanian, tenaga kerja sektor non-pertanian terhadap jumlah penduduk miskin di Kab/ kota Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa sumber informasi pada kajian ilmu ekonomi yang sejenisnya berkaitan dengan kemiskinan serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan, terkait dengan analisis pengaruh pertumbuhan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat pengangguran penduduk setengah menganggur, tenaga kerja sektor pertanian, tenaga kerja sektor non pertanian terhadap jumlah penduduk miskin.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.